



SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman NO.54 Padang 25137 Tlp.0751-40818 Fax 0751-40811,40817

Koran		Hal
Haluan		
Padang Ekspres		
Singgalang	✓	B15
Pos Metro		

Tahun	2017		
Bulan			
Jan		Juli	
Feb		Agust	
Mar		Sep	
Apr		Okt	
Mei		Nov	✓
Jun		Des	

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

Penggunaan Dana Desa Perlu Diaudit

Nan Sabaris, Singgalang
Penggunaan dana desa 2016 di Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman perlu diaudit. Pasalnya, hampir semua titik pengerjaan fisik pada tahun anggaran 2016 diduga salah kebijakannya.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) nagari itu pada tahun tersebut, Buyung Sauki mengaku tak diajak dalam persoalan demikian.

"Semestinya pekerjaan ini dikelola secara padat karya oleh TPK. Itu aturan yang jelas," kata dia saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Namun, kata Buyung Sauki yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Kapalo Koto, pengejaan kegiatan diborongkan kepada orang yang bukan TPK.

"Jangankan diajak kerjasama, untuk beli ini dan itu

yang berhubungan dengan kebutuhan bangunan saja, saya tak dilibatkan," tegasnya. Sebagai masyarakat asli nagari itu, Buyung Sauki melihat pekerjaan fisik dari anggaran 2016 itu, pihak nagari banyak melibatkannya orang yang bukan warga nagari.

Soal ini, pejabat Wali nagari Kapalo Koto Malis yang dihubungi di kantornya di Balai Basuo, tak membantah. Namun, pihaknya telah berusaha mengajak masyarakat Kapalo Koto, tetapi tak banyak yang mau.

"Persentasinya separuh-separuh. Artinya, seperti pengerjaan sebuah jembatan, yang bagian ujung utara dikerjakan oleh tukang urang awak, dan sebelah ujung selatan dikerjakan tukang Jawa," ungkapnya.

Beberapa titik pengerjaan yang diduga dibo

rongkan, pembangunan Jembatan Jiraik Baruah, Jembatan Mudiak Subarang, Polides, jalan coran atau rabat beton menuju SDN 05 Nan Sabaris, pembangunan tiga unit pos ronda.

Sebagai orang yang diamanahkan menjabat di nagari itu, Malis merasa kewalahan menghadapi berbagai persoalan di masyarakat. Namun, dia telah merasa melakukan kegiatannya sesuai petunjuk dan juknis yang ada.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Padang Pariaman, Erman menegaskan, apapun bentuk pengerjaan fisik dan kegiatan di nagari harus dikelola oleh TPK yang melibatkan anak nagari. Ini tentunya bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari itu sendiri. (501)